



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAZEL FATRA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 724855

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.340.000.000

1. Tanah Seluas 567 m2 di MUARO JAMBI, HADIAH Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/100 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah Seluas 9386 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/13 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 449 m2 di TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AV1414FSDX(4X2)M/T Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000
2. LAINNYA, MR. JACKIE SEPEDA ELEKTRIK Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO HONDA/X1H02N35M1 A/T Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 123.500.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.173.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 162.000.000

Sub Total Rp. 1.763.673.000

III. HUTANG Rp. 124.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.639.673.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.